



Hlm 21

Ahok-DPRD
Dipertemukan
Hlm 2Pajak Tol tak
Berdampak pada Barang
Hlm 13Ranjau ISIS Hambat
Pasukan Irak
Hlm 19KHAZANAH
Hlm 21-22

Mantan Komisioner KPK Turun Gunung

■ Mas Alamil Huda,
Halimatus Sa'diyah

JAKARTA — Sejumlah mantan komisioner dan pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi gedung KPK, Rabu (4/3). Mereka menemui para pemimpin dan plt pemimpin KPK untuk menyuarakan kekhawatiran adanya indikasi kelemahan KPK.

Indepth
Alumni Desak
KPK Ajukan PK

Hlm— 9

Mantan komisioner KPK Muhammad Jasin menilai, saat ini lembaga antikorupsi itu diserang dari berbagai sisi. "Sekarang (pelemahan) dari luar dan dalam, *nggak* hanya dari dalam," katanya, Rabu (4/3). Dia mengatakan, aksi pegawai yang melakukan protes terhadap

Bersambung ke hlm 9 kol 4-6

Puncak Kemarau Juli, Petani Percepat Masa Tanam

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau akan jatuh pada Juli hingga September tahun ini. Kementerian Pertanian meminta petani meleakaskan masa tanam untuk mengantisipasi datangnya kemarau.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya menyebut bahwa 85 persen wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau pada Juni mendatang. Angka ini adalah akumulasi sejak April (29,8 persen wilayah), Mei (28,9 persen wilayah), dan Juni (24,6 persen wilayah). "Artinya, di seluruh wilayah 85 persennya paling tidak curah hujan sudah kurang dari 150 mm per bulan," ujar Andi, Rabu (4/3). Sejauh ini, menurut Andi, BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini tidak akan mengganggu musim tanam. Namun, Andi menegaskan, untuk memastikan apakah musim kemarau akan lebih panjang atau tidak baru bisa diperhitungkan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Bersambung ke hlm 9 kol 1-3

Rehat

Iklim tak jamin produksi pangan
Termasuk iklim politik, ya?

YLKI: Batalkan PPN Tol
Yakin didengar?

Regu Tembak Disiapkan

PROSESI EKSEKUSI



Sumber: perkap no 12 tahun 2010/uu nomor 2 /pnps/1964/ kejakgung

■ Ahmad Baraas, Halimatus Sa'diyah

Presiden menginstruksikan agar eksekusi terpidana mati segera dilakukan.

JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan regu tembak yang bertugas mengeksekusi terpidana mati. Dalam waktu dekat, eksekusi tahap kedua akan dilakukan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, menyusul eksekusi tahap pertama pada 18 Januari 2015.

Menurut Wakapolri Badrodin Haiti, setiap regu tembak terdiri atas 13 personel yang menangani satu terpidana mati. "Jumlah terpidananya 10, ya 10 regu yang disiapkan. Berarti ada 130 personel," ujarnya sesuai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden, Rabu (4/3).

Dari jumlah tersebut, delapan di antaranya adalah terpidana mati kasus narkoba, termasuk anggota Bali Nine asal Australia, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Menurut Badrodin, regu tembak yang dikerahkan berasal dari Polda Jawa Tengah.

Saat ini, mereka telah berada di Nusakambangan, tempat eksekusi

akan berlangsung. Tak hanya menyiapkan regu tembak, Badrodin mengatakan bahwa Polri menyiapkan pula personel keamanan yang berjaga pada saat eksekusi berlangsung. Jadi, terdapat 250 personel kepolisian yang disiapkan mencakup regu tembak dan personel keamanan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan eksekusi segera dilakukan. "Presiden bilang lakukan saja, tadi itu sempat dikatakan. Tinggal tunggu persiapan teknis di kejaksaan."

Jaksa Agung M Prasetyo belum bisa memastikan hari pelaksanaan eksekusi, termasuk semua persiapan di lapangan. Ia beralasan, tak ada target dalam proses persiapan eksekusi. Soal jumlah terpidana mati yang bakal dihadapkan ke regu tembak, juga akan difinalisasi.

Menurut dia, hal yang sudah jelas, eksekusi pasti dilaksanakan. "Semua terpidana mati, tak hanya anggota Bali Nine, akan dieksekusi secara serentak," katanya. Menurut *Sydney Morning Herald*, Prasetyo kemungkinan memberitahu waktu eksekusi pada Jumat (6/3).

Diprediksi pelaksanaan eksekusi paling cepat berlangsung pada Ahad

Indepth
Serangan pada
KJRI Diminta
Diusut

Hlm— 8

malam. Kemarin, anggota Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, akhirnya dipindahkan dari Lapas Kerobokan, Bali, ke Nusakambangan.

Mereka diterbangkan dari Bandara Ngurah Rai, Bali, menggunakan pesawat komersial Wings Air ATR-72600 dikawal 20 pengawal khusus sekitar pukul 07.20 WITA. Peminjaman mereka terkesan diam-diam. Karena, rencana peminjaman diadwalkan siang hari.

Namun ternyata, keduanya diangkut dari Lapas Kerobokan menuju Bandara Ngurah Rai menjelang Subuh atau sekitar pukul 05.10 WITA. Dua kendaraan lapis baja jenis barakuda dan anoa mengawal keberangkatan mereka ke bandara.

Sepuluh menit sebelum pesawat Wings Air lepas landas, dua pesawat tempur TNI jenis Sukhoi terbang mendahului. Kepala Lapas Kerobokan Bali Sudjonggo mengatakan, Chan dan Sukumaran sempat berpidato dengan rekan-rekannya narapidana lainnya.

Ketika ditanyai kesiapan mereka untuk diberangkatkan, kata Sudjonggo, tak satu pun dari Chan dan Sukumaran yang menjawab dengan suara. Mereka hanya menganggukkan kepala. Menurut dia, ada proses isolasi saat mereka berada di Nusakambangan.

Chan dan Sukumaran mendarat di Bandara Tunggulwulung, Cilacap, pukul 08.00 WIB. Setelah beberapa menit pesawat mendarat, rombongan yang membawa kedua terpidana mati itu diangkut dua unit kendaraan taktis Polres Cilacap, barakuda.

Mereka tiba di Dermaga Wijayapura sekitar pukul 08.45 WIB. Iring-iringan mobil langsung masuk ke kapal Pengayoman IV yang sudah menunggu sejak pukul 06.00. Tak berapa lama, kapal tersebut langsung menyeberang menuju Dermaga Sodong, Nusakambangan.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengingatkan, hubungan Australia-Indonesia akan melalui periode yang sangat sulit karena eksekusi Chan dan Sukumaran. "Jutaan warga Australia merasa marah dan sakit hati karena eksekusi ini."

Meski demikian, Abbott mengakui kemarahan bukan dasar yang bagus untuk menentukan kebijakan luar negeri sebuah negara. Menlu Julie Bishop pun menegaskan, kelak ada konsekuensi dari pelaksanaan eksekusi Chan dan Sukumaran. Bishop yang dikutip *Sydney Morning Herald* menambahkan, meski ada eksekusi atas warganya, Australia kemungkinan tidak akan memanggil duta besarnya dari Indonesia. ■ ahmad baraas/mutia ramadhan/c67 ed: ferry kishandi

Obama Tanggapi Dingin Pidato Netanyahu

■ Gita Amanda

WASHINGTON — Langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menuai dukungan dari Amerika Serikat (AS) soal nuklir Iran, bertepuk sebelah tangan. Presiden AS Barack Obama menyambut dingin Netanyahu yang bertandang ke Washington.

Pada Selasa (3/3), Netanyahu berbicara di Kongres AS. Ia mengingatkan, negosiasi nuklir yang melibatkan Iran dan enam negara besar, yakni AS, Rusia, Cina, Prancis, Inggris, dan Jerman tak bakal menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir.

Netanyahu masih meyakini, Iran berada dalam tahapan yang hampir

mencapai pembuatan senjata nuklir. Menurut dia, waktu membuktikan Iran tak bisa dipercaya. Iran akan wujud sebagai wajah berbahaya di Timur Tengah dengan senjata nuklirnya.

Di sela pidato, anggota Kongres dari Partai Republik melakukan *standing ovation*. Sementara, anggota Partai Demokrat, pendukung Obama, bersikap sebaliknya. Sebagian menunjukkan raut wajah dan gestur tubuh yang menegaskan penolakan isi pidato Netanyahu.

Merespons Netanyahu, Obama menegaskan bahwa tak ada hal yang baru dalam pidatonya di Kongres. "Perdana Menteri tak menawarkan alternatif yang memungkinkan bisa dijalankan dalam penyelesaian nuklir Iran," ungkapnya di Gedung Putih.

Obama menganggap Netanyahu tak ikut menyelesaikan persoalan terkait program nuklir Iran. Saat ini, negosiasi mengenai nuklir Iran masih berlangsung dan diharapkan terjadi kesepakatan mengikat pada akhir Maret ini.

Dinas rahasia Israel, Mossad, dalam sejumlah dokumen rahasia yang akhirnya bocor, menyebutkan, sebenarnya kemampuan Iran belum sampai pada level pembuatan senjata nuklir. Dengan demikian, mereka tak sepatutnya dengan keyakinan Netanyahu mengenai senjata nuklir Iran.

Obama mengaku tak melihat tayangan pidato Netanyahu yang disiarkan televisi. "Saya hanya membaca transkripnya," katanya. Selain melontarkan pernyataan tegas, Obama me-

ngatakan tak akan menemui Netanyahu.

Ia beralasan, AS akan dianggap melakukan intervensi karena pada 17 Maret mendatang, Israel akan menggelar pemilihan umum. Apalagi, pimpinan Partai Republik yang mendukung Netanyahu tak berkonsultasi terlebih dulu dengan Gedung Putih.

Sementara, pemimpin faksi Demokrat di Kongres, Nancy Pelosi, menilai, pidato Netanyahu merupakan penghinaan terhadap kemampuan intelijen AS. Pemerintah Iran menyatakan, pidato Netanyahu hanya bersifat pengulangan pernyataan sebelumnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Marzieh Afkham mengatakan, pidato bernada *Iranophobic* itu berisi kebohongan. ■ ap/reuters/c65 ed: ferry kishandi

Jalan Panjang Identitas Muslim Rohingya (Bagian 2) Perubahan di Kamp Pengungsi

Lebih dari 100 ribu Muslim Rohingya masih tinggal di dalam kamp pengungsian sejak konflik komunal pecah di Provinsi Rakhine, Myanmar, tiga tahun lalu. Mereka tidak bisa menjadi warga "merdeka" karena dianggap bukan warga negara Myanmar. Bagaimana sebenarnya kondisi pengungsi di sana? Berikut laporan wartawan *Republika*, **Hazliansyah**, yang masuk ke kamp dan bertemu sejumlah tokoh.

Di salah satu sudut dekat bangunan klinik di kamp, Muhammad Shafi (62 tahun) dengan ramah menyambut kedatangan tim. Ia bercerita sudah ada perubahan di kamp dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Di bidang pendidikan, misalnya. Di setiap kamp sudah ada *temporary school* yang memberikan pelajaran bagi anak-anak. Setiap hari para siswa mendapat pelajaran yang diberikan oleh guru-guru yang kebanyakan sukarelawan. Baik dari pengungsi itu sendiri ataupun orga-

nisasi lokal dan internasional. "Orang tua juga ada yang belajar baca dan tulis di sekolah," ujar Shafi.

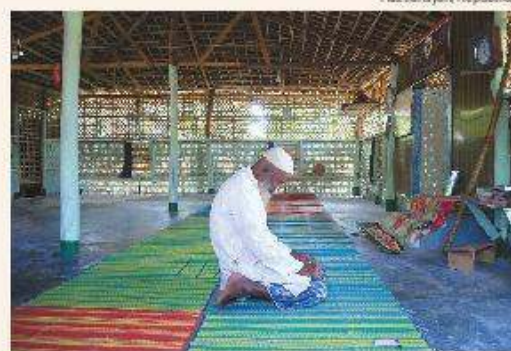
Sedangkan untuk kesehatan, sudah terdapat klinik di dalam kamp. Setiap harinya dokter melakukan kunjungan dan memberi pengobatan lengkap dengan obat-obatan. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan untuk ibu dan anak.

Dinas Kesehatan Sittwe telah memiliki sistem yang baik dalam pelayanan kesehatan, yakni fasilitas kesehatan berjenjang. Pelayanan kesehatan diberikan untuk peng-

ungsi maupun masyarakat umum.

Dr Aung Thurein selaku Deputy State Health Director of Sittwe menjelaskan, pusat kesehatan yang ada di dalam kamp dan sekitarnya disebut sebagai "Self Centre". "Self Centre" melayani pemeriksaan dan pengobatan untuk penyakit yang tergolong ringan.

Namun, jika pasien butuh pemeriksaan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke "Health Centre" yang berada di tingkat semacam



● Pengungsi Muslim Rohingya tengah shalat di mushala di dalam kamp.

Bersambung ke hlm 9 kol 1-6

Penyidik Bareskrim Geledah Kantor Kemenristek

JAKARTA — Kasubdit I Tipikor Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Samudi mengatakannya, pada Rabu (4/3), tugasnya melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi bus listrik di Kemenristek tahun anggaran 2013. "Yang digeledah dua tempat Menristek dan rekanan," ujar Samudi, di Jakarta, Rabu (4/3).

Samudi menerangkan, penggeledahan dilakukan di lantai 19-

22 kantor Kemenristek. Dilantai tersebut terdapat ruangan Deputy dan Biro Umum. Ditanya mengenai tersangka dalam kasus ini, Samudi menyebut inisial Dr P yang menjabat sebagai deputy. "Diduga melakukan tindak pidana saat asdep sekarang deputy," katanya.

Dalam penggeledahan tersebut, kata Samudi, penyidik menargetkan bisa menyita dokumen perencanaan saat dilakukan kontrak pembelian bus listrik bersama rekanan. Dalam

kontrak, lanjut dia, pembelian bus sebanyak 11, namun kenyataannya hanya delapan. "Harusnya 2013 sudah siap tapi sampai batas waktu bus belum lengkap," dia menambahkan.

Terkait rekanan Kemenristek dalam proyek pengadaan bus listrik ini, kata Samudi, masih berstatus calon tersangka. Kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi ini sendiri, menurut Samudi, mencapai Rp 5 miliar.

■ c67 ed: andri saubani

Indonesia Bakal Berpartisipasi di IMDEX Asia 2015

JAKARTA — International Maritime Defence Exhibition and Conference (IMDEX) Asia 2015 digelar dalam waktu dekat. Pameran dan konferensi teknologi pertahanan di sektor kemaritiman itu bakal dihelat di Changi Exhibition Center, Singapura, pada 19 hingga 21 Mei 2015.

Ajang ini menjadi kesempatan untuk Indonesia dalam upaya memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista), terutama yang menyangkut dengan pertahanan di sektor

maritim. Terlebih dengan adanya visi yang diembuskan Presiden Joko Widodo, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai 'poros maritim dunia'.

TNI Angkatan Laut (AL) akan mengirimkan kapal perang jenis fregat dan kapal-kapal patroli. "Mengingat Indonesia sedang membangun sumber daya maritimnya, kami senang bahwa delegasi maupun pengunjung Indonesia melihat betapa pentingnya berpartisipasi dalam IMDEX Asia 2015," kata Leck Chet Lam,

Managing Direktur Experia Events, penyelenggara IMDEX Asia 2015, di Jakarta, Rabu (4/3).

Lam menambahkan, pada gelaran IMDEX Asia 2013 setidaknya ada 194 pelaku industri pertahanan maritim dari 29 negara yang ikut ambil bagian. Angka ini pun diharapkan bertambah pada gelaran IMDEX Asia 2015. Selain itu, kawasan Asia Pasifik merupakan pasar terbesar kedua setelah Amerika Serikat dalam hal industri pertahanan.

■ reja irfa widodo ed: andri saubani



Widhan Hidayat/Republika

Sarankan PK

Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3). Abdullah menyarankan KPK melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

BW Mengaku tak Kenal Tersangka Z

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto (BW) mengaku tidak kenal dengan tersangka berinisial Z yang ditangkap penyidik Bareskrim, di Solo, Jawa Tengah, pada Senin (2/3). Tersangka Z ditangkap terkait penyidikan kasus dugaan memerintahkan kesaksian palsu di persidangan yang menjerat Bambang.

Menurut Bambang, kasus yang menjeratnya kini, terjadi lima tahun silam. Sehingga ia tidak mengingat dia mengaku tersangka Z yang merupakan sepupu dari Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar. "Dan mungkin harus lihat wajahnya lagi," kata Bambang saat mendatangi gedung Bareskrim Polri, di Jakarta, Rabu (4/3).

Meski mengaku tidak mengenal tersangka Z, Bambang menduga orang yang ditangkap penyidik Bareskrim itu adalah salah satu saksi yang pernah diperiksa majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Barat. Bambang menyatakan, siap memberikan keterangan terkait tersangka Z kepada penyidik. "Saya menduga seperti itu," kata Bambang.

Didampingi tim kuasa hukumnya, Bambang kemarin tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 15.15 WIB. Setelah keluar dari ruangan penyidik, Bambang menjelaskan, terjadi salah persepsi atas surat dari Pelaksana tugas (Plt) Kapolri kepada dirinya. "Ternyata surat dari Plt berisi saya tidak diperiksa sejak pekan lalu sampai kemarin," ujar Bambang.

Sebagai penegak hukum, Bambang menyatakan dia akan konsisten mengikuti proses hukum. Penyidik Bareskrim Polri, kata Bambang, akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadapnya. "Saya diminta datang hari Senin (9/3) tapi kemungkinan hari Rabu (11/3) dipeliksanya, saya belum tahu tersangkanya siapa," katanya.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Z hingga kemarin masih menjalani pemeriksaan. Rikwanto menerangkan, Z ditangkap setelah dua kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan Bareskrim setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka. "Setelah penyelidikan yang intensif, penyidik berhasil menangkap Z di Solo pada 2 Maret. Lalu pada 3 Maret, ia dibawa ke Jakarta," kata Rikwanto.

Dalam kasus BW, Z diduga berperan mengkoordinir para saksi yang memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di MK pada 2010. Hal ini diamini oleh Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona. "Keterlibatannya sangat besar dengan kasus BW," ■ c7/antara ed: andri saubani

Widhan Hidayat/Republika

Sidang Perdana

Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko menjalani sidang perdana kasus suap dalam jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/3). Kasus suap ini menyeret Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin melalui operasi tangkap tangan KPK pada 1 dan 2 Desember 2014.

Ahok- DPRD Dipertemukan

■ Halimatus Sa'diyah

Mendagri tidak menginginkan APBD tersandera sehingga merugikan masyarakat.

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempertemukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pihak DPRD DKI Jakarta pada hari ini (5/3). Pertemuan antara dua pihak yang tengah berkonflik ini bertujuan untuk memastikan tetap disahkannya APBD 2015. "Saya masuk agar APBD tidak tersandera. Masyarakat Jakarta akan marah, PNS DKI juga soal gajinya, administrasi anggaran harus secepatnya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di kantor Kemendagri, Rabu (4/3).

Tjahjo menegaskan dirinya tidak mau ikut campur dalam konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Menurut Tjahjo, kepentingan saat ini adalah agar APBD DKI Jakarta bisa segera disahkan dan dicairkan. Sebagai so-

lusi agar konflik segera berakhir, Kemendagri akan melakukan supervisi dan merevisi APBD 2015 dengan seksama. "Target kami tanggal 8 Maret paling lambat harus disetujui apa pun yang terjadi karena sudah dibahas di dewan, dengan menghargai proses politik oleh DPRD dan hukum oleh gubernur," kata Tjahjo, menegaskan.

Jika sampai 8 Maret, Ahok dan DPRD DKI Jakarta tidak menemui kesepakatan terkait APBD 2015, Tjahjo menegaskan, Kemendagri memiliki opsi tersendiri. Namun, Tjahjo enggan menjelaskan apa opsi yang akan diambil Kemendagri agar APBD 2015 tetap bisa direalisasikan. "Kalau tidak sebagai menteri saya punya opsi. Yang penting sebelum tanggal 8 harus bisa diselesaikan."

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menilai, pertemuan antara pihaknya dengan Ahok dan DPRD DKI Jakarta, selama ini belum cukup. Sehingga, Kemendagri berinisiatif mempertemukan kedua pihak pada Kamis (5/3). "APBD harus kita selamatkan, harus ada keputusan politik nantinya, tapi ruang (pertemuan) ini harus kita buka dulu untuk berdialog dengan kedua-duanya," ujarnya.

Ahok kemarin telah berkunjung ke kantor Kemendagri. Dalam kesempatan itu, Ahok menyatakan permintaan maafnya kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan masyarakat Jakarta atas konflik yang terjadi. Ahok pun mengapresiasi Mendagri yang mendukungnya menerapkan prinsip *e-budgeting* dalam penganggaran belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Kami membela supaya PNS jangan mau lagi ada korban dengan adanya anggaran-anggaran siluman," kata Ahok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menegaskan, DPRD akan meneruskan Hak Angket terhadap Ahok. Politisi yang akrab dipanggil Haji Lulung itu menyatakan, Hak Angket diambil untuk membuktikan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak bersalah dalam proses penganggaran APBD 2015.

Setelah disetujui pada 26 Februari lalu, dua fraksi yakni Nasional Demokrat dan PKB memutuskan mundur dari pengajuan Hak Angket. Lulung pun membantah kabar yang menyebutkan fraksi PPP juga akan mencabut dukungan Hak Angket. "Saya jalan terus. Nggak ada penghentian apa pun," kata Lulung, Rabu (4/3).

Jusuf Kalla Kritik Kebijakan Jokowi

■ Dessy Suciati Saputri, Halimatus Sa'diyah

JAKARTA — Unit Staf Kepresidenan telah diubah menjadi Kantor Staf Presiden oleh Presiden Jokowi. Perubahan ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 yang juga diikuti dengan penambahan kewenangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun menilai penambahan kewenangan terhadap Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan ini dapat menyebabkan munculnya koordinasi yang berlebihan. Banyaknya koordinasi ini, kata dia, dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam koordinasi pemerintahan.

"Mungkin nanti koordinasi berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang bisa mengkoordinasi pemerintahan. Berlebihan nanti. Kalau berlebihan bisa simpang siur," jelas JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (4/3).

Dalam pertemuan JK dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edy Purdijatno pada siang ini, JK juga membahas dampak dari diterbitkannya Perpres 26/2015. "Kita bicarakan juga efeknya tentu dan akibat-akibatnya. Perlu supaya jangan menjadi kesimpangsiuran di pemerintahan," jelas JK.

Menurut JK, penambahan kewenangan terhadap kepala Staf Kepresidenan ini mungkin hanya akan bersifat jangka pendek. "Itu mungkin hanya suatu jangka pendek saja," ujar JK.

Kepala Staf Kepresidenan yang diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang

Unit Staf Kepresidenan tetap menjabat sebagai kepala Staf Kepresidenan berdasarkan perpres ini. Sehingga, meski perpres direvisi, posisi Luhut Panjaitan dianggap tetap namun hanya berubah nama dari yang sebelumnya kepala Unit Kepresidenan menjadi kepala Staf Kepresidenan.

Lembaga yang dipimpin oleh Luhut Pandjaitan selain bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada presiden dan wakil presiden sebagaimana sebelumnya dilakukan melalui Unit Staf Kepresidenan, juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Selain itu, Luhut juga dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian guna memper lancar jalannya program pemerintahan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan, Kantor Staf Kepresidenan akan menjalankan fungsi pengawasan. Memang, kata dia, selama ini manajemen kontrol pengawasan dipegang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, Presiden menilai perlu ada pihak lain yang melakukan pengawasan secara berkala.

"Hari per hari, pekan per pekan, bulan per bulan *kan* ada evaluasi. Dari mana evaluasi itu? Ya, dari Kantor Kepresidenan," ujarnya di ruang wartawan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/3).

Pengawasan yang dilakukan Kantor Kepresidenan dianggap penting agar Jokowi tak mendapat laporan semu. Sebab, jika kementerian sendiri yang melaporkan capaian-capaian mereka, Presiden khawatir hanya mendapat laporan yang bagus-bagus.

■ ed: muhammad hafid



■ Rr Laeny Sulistyawati

JAKARTA — Iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang semula Rp 19.225 naik menjadi Rp 27.500 per orang. Kenaikan tarif mulai berlaku mulai 2016. "Alasan (kenaikan) pertama karena regulasi Undang-Undang 24 Tahun 2011 bahwa ada peninjauan harga iuran setelah dua tahun. Artinya, kami tidak menyalahi regulasi," kata Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Ikhsan, Rabu (4/3).

Ikhsan melanjutkan, alasan kenaikan besaran iuran PBI lainnya, yakni sesuai dengan usulan yang diajukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan iuran peserta PBI, yaitu yang semula Rp 19.225 per

bulan/orang menjadi Rp 27.500. Tak hanya iuran untuk peserta PBI, kata Ikhsan, pihaknya juga tengah menghitung komponen-komponen penghitungan tarif iuran BPJS Kesehatan, baik untuk kategori individu maupun perusahaan di semua kelas. "Jika tidak ada peninjauan iuran, *sustainability* kami dapat terganggu," katanya.

Apalagi, kata Ikhsan, pihaknya sempat membayar klaim lebih besar dibandingkan dana iuran yang masuk ke BPJS Kesehatan. Namun, hal itu bisa diantisipasi dengan menggunakan dana cadangan teknis sehingga pembayaran klaim bisa teratasi.

BPJS Kesehatan mencatat terjadi defisit pada laporan keuangan pada 2014. Total iuran yang dikumpulkan BPJS Kesehatan sebanyak Rp 41,06 triliun. Sedangkan, total manfaat dan klaim yang dibayar sebesar Rp 42,6 triliun. Akibatnya, rasio klaim-

nya tembus hingga 103,88 persen. Defisit itu kemudian diatasi BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana cadangan teknis sebesar Rp 6 triliun.

Pada akhir 2014, sisa dana cadangan sebesar Rp 2,2 triliun. Dana cadangan ini kemudian dialokasikan lagi oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 5 triliun.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui adanya evaluasi iuran BPJS Kesehatan. Menurut Nila, Presiden Jokowi bahkan menyetujui iuran dari PBI yang berasal dari kalangan tidak mampu ditambah besarannya. "Kalangan tidak mampu" Nanti akan mendapat dari APBN yang mungkin akan lebih besar," kata Nila. ■ ed: andri saubani

Pramono Kawal Budi Gunawan

Machfud Suroso Dituntut 7,5 Tahun

■ Mas Alamil Huda



Pramono punya tanggung jawab mengawal kepentingan partai

samping terus naik taksi *kan*,” kata Hamdi kepada *Republika*, Selasa (3/3).

dalam Koalisi Indonesia Hebat,” kata Pangli.

Selain itu, dilihat kehadiran masi ulang tentang penilaian

10 Januari 2015

Pramono mengucapkan selamat atas dicalonkannya Budi Gunawan sebagai calon Kapolri melalui akun *Twitter*-nya. "Selamat bertugas di posisi baru sahabatku, menjadi orang pertama #TB1 (Kapolri)."

12 Januari 2015

Pramono membela Budi Gunawan. Ini setelah banyak pihak yang menilai Budi Gunawan dipilih karena kedekatan dengan mantan presiden Megawati Soekarno-putri. "Budi Gunawan memang pernah menjadi ajudan Ibu Mega. Apakah salah bila mantan ajudan yang juga lulusan terbaik kemudian menjadi calon Kapolri?"

15 Januari 2015

Pramono menemui Budi Gunawan di ruang VIP DPR saat sidang paripurna diskors.

16 Januari 2015

Pramono menemui Presiden Jokowi di Istana Negara usai DPR meloloskan Budi Gunawan dalam *fit and proper test* sebagai calon Kapolri. "Keputusan DPR (meloloskan Budi). Bagaimanapun, sidang paripurna sudah memutuskan dan sudah menjadi kewajiban Presiden untuk tindak lanjuti itu."

29 Januari 2015

Pramono memprotes rekomendasi Tim Sembilan yang meminta Jokowi tak melantik Budi Gunawan. "Tim belum ada kepres dan sudah bekerja satu hari (kemudian) sudah buat *statement* dan *bikin* gaduh."

2 Maret 2015

Pramono menemui Jaksa Agung M Prasetyo usai pimpinan KPK melimpahkan berkas kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Ia berkecil pertemuannya untuk membahas Budi. "Gak ada membahas apa pun. *Nggak* ada apa-apa."

Sumber: Pusat Data Republika

‘Bola’ di Tangan MA dan Menkumham

Agung Supriyanto/Republika



Daftar ke Kemenkumham Ketua DPP Bidang Hukum Golkar Lawrence Siburian memberikan keterangan terkait kedatangannya ke Kemenkumham, Jakarta, Rabu (4/3). Golkar kubu Agung Laksono mendaftarkan kepengurusan hasil Munas Golkar Jakarta ke Kemenkumham menyusul putusan Mahkamah Partai Golkar, Selasa (3/3).

■ Bambang Noroyono, Desy Suciati Saputri

Mahkamah Partai Golkar menegaskan tak ada putusan mengesahkan kubu manapun.

JAKARTA — Mahkamah Partai Golkar (MPG) menyerahkan ‘bola panas’ penyelesaian dualisme kepengurusan Partai Golkar ke pemerintah dan pengadilan. Ketua MPG Muladi mengatakan, putusan mahkamah akan direkomendasikan ke Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM. Rekomendasi tersebut akan menjadi pijakan MA dan Kemenkumham untuk mengakui mana kepengurusan Partai Golkar yang sah. “Yang berwenang (mengesahkan) Menkumham. Tapi kemarin, Munas Bali ternyata juga mengajukan kasasi,” katanya saat konferensi pers.

dua jalurnya (pengesahan kepengurusan Golkar). Munas Bali lewat yudikatif (kasasi ke MA). Agung (Munas Ancol) silakan ke Kemenkumham,” ujar dia. Muladi menjelaskan, mahkamah memang tak mengambil keputusan soal kepengurusan partai yang sah saat sidang putusan MPG pada Selasa (3/3). Keputusan tersebut lantaran perbedaan pendapat para hakim anggota mahkamah. Multitafsir terjadi di dua kubu. Kubu Munas Ancol mengklaim mahkamah mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Sebaliknya, kubu Aburizal Bakrie sebagai termohon mengungkapkan, keputusan MPG tak memenangkan siapa pun dan menyerahkan perkara dualisme

itu ke ranah hukum. Muladi menegaskan, putusan MPG tak memenangkan kubu Ical ataupun kubu Agung. Untuk kasus ini, MPG tak memiliki putusan atas nama mahkamah, tetapi putusan masing-masing anggota hakim. “Keputusan MPG tidak ada memenangkan salah satu pihak,” kata dia. Menurutnya, banyak media yang keliru memberitakan bahwa putusan MPG memenangkan kepengurusan Golkar Munas Ancol. Padahal, dia menegaskan, MPG dalam putusannya tak memuat amar putusan soal kepastian siapa kepengurusan Golkar yang sah. Meski dua dari empat anggota mahkamah menyatakan kepemimpinan Agung Laksono dari hasil Mu-



Upaya Aburizal Bakrie

- 12 Januari 2015** Aburizal Bakrie menggugat kepengurusan Agung Laksono di PN Jakarta Barat (Jakbar).
- 11 Februari 2015** Menolak Mahkamah Partai Golkar dan memilih untuk menunggu putusan PN Jakbar.
- 24 Februari 2015** PN Jakbar memutuskan menolak mengadili sengketa Partai Golkar dan mengembalikan penyelesaian ke mahkamah partai.
- 25 Februari 2015** Mengajukan eksepsi dan saksi-saksi dan DPD dan panitia Munas Bali pada sidang terakhir MPG sebelum putusan. Para saksi mengungkapkan politik uang di dua Munas.
- 2 Maret 2015** Kubu Ical mengajukan upaya kasasi atas putusan PN Jakbar ke MA.
- 3 Maret 2015** Dua hakim MPG, Muladi dan HAS Natabaya, memutuskan untuk menerima eksepsi Aburizal Bakrie Ical sebagai dan menolak permohonan Agung Laksono. Mereka menyerahkan dualisme Golkar disebabkan lewat putusan kasasi Mahkamah Agung yang dimohonkan Ical.



Upaya Agung Laksono

- 5 Desember 2014** Agung Laksono menggugat Aburizal Bakrie, Idrus Mahami, Fadel Muhammad, Nurdin Halid, dan Ahmad Noor Supit terkait perselisihan partai politik ke PN Jakarta Pusat.
- 8 Desember 2014** Kubu Agung dan kubu Ical mendaftar kepengurusan ke Kemenkumham.
- 22 Desember 2014** Kedua kubu menggelar perundingan untuk damai.
- 2 Februari 2015** Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi kubu Aburizal Bakrie bahwa PN Jakarta Pusat tak berwenang mengadili perkara sengketa Golkar dan menolak gugatan Agung Laksono.
- Februari 2015** Mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai Golkar.
- 11 Februari 2015** MPG gelar sidang perdana.
- 17 Februari 2015** Mengajukan saksi ke MPG yang mengungkapkan adanya politik uang di Munas Bali.
- 3 Maret 2015** Dua hakim MPG, Djari Marini dan Andi Matalatta, mengabulkan permohonan pemohon untuk selang. Mereka menganggap Golkar Munas Ancol pimpinan Agung Laksono merupakan kepengurusan yang sah.

sumbu: pusan data republika

nas Ancol adalah sah, Muladi mengungkapkan, pendapat dua hakim tersebut merupakan pandangan pribadi, bukan keputusan MPG. Seperti halnya, kata dia, pendapat dua hakim lain yang memilih untuk menyatakan penyelesaian sengketa kepartaian lewat pengadilan. Dia pun meminta mereka yang ingin menafsirkan membaca isi putusannya dari awal hingga akhir. “Seperti *draw*. Itu perbedaan pendapat,” sambungnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Munas Ancol Zainudin Amali menjelaskan, pihaknya sudah mendaftarkan kepengurusan Golkar Munas Ancol kepada Kemenkumham, kemarin. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, putusan kepengurusan Partai Golkar akan diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Keputusannya memang seperti yang dibacakan. Tentu, masing-masing menafsirkan yang berbeda-beda. Tapi, biar nanti Menkumham yang memutuskannya,” katanya di Kantor Wapres, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pemerintah akan menilai dua putusan MPG. “Tentu, saya katakan memang keputusan itu perlu masing-masing punya sikap

(Putusan MPG) Seperti draw. Itu perbedaan pendapat sesuai penafsiran. Keputusan akhirkan di tangan Menkumham,” ujar JK. Menanggapi langkah tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali Fadel Muhammad meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berhati-hati dalam menyimpulkan keputusan. Menurutnya, pertikaian dua kepengurusan masih berada di ranah hukum. “Kami memastikan akan protes kalau Menkumham mengesahkan kepengurusan mereka. (Munas Ancol),” kata Fadel lewat pesan singkat. Ditanya soal protes seperti apa yang dimaksud, Fadel pun menegaskan, “Tak ada jalan lain selain ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).” ■ ed: a syalaby ichsan

Kesal karena Kasasi Kubu Ical

EDUKASIONAL »

UP Deklarasikan Komitmen Bebas Narkoba

JAKARTA — Rektor Universitas Pancasila (UP) Wahono Sumaryono mewakili seluruh sivitas akademika universitas tersebut mendeklarasikan komitmen kampusnya untuk bebas dari narkoba. Komitmen tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba. "Ini merupakan tidak lanjut dari kunjungan kami dalam kerja sama dengan BNN, beberapa waktu lalu," ujar Wahono di Ja-

karta, Rabu [4/3]. Langkah itu juga didasari fakta dari hasil survei yang dilakukan oleh BNN dan Universitas Indonesia (UI) sejak tahun 2004, 2008, 2011 dan 2014 lalu, di mana angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Sebelumnya, beberapa mahasiswa UP juga sempat menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Wahono mengatakan, dalam satu tahun terakhir, terdapat delapan orang mahasiswa yang terpaksa dikeluarkan karena tertangkap

tangan menggunakan narkoba. Ia mengatakan, rata-rata mahasiswa yang menggunakan narkoba sudah kuliah di semester enam. Mereka tertangkap di luar lingkungan kampus. Untuk itu, Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Pancasila bekerja sama dengan BNN mengadakan *training of trainers* (ToT) soal upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba kepada seluruh sivitas akademika. ■ mg02 **ed:** andi nur aminah

UII Sumpah 100 Apoteker

YOGYAKARTA — Apoteker diminta bisa mendidik masyarakat agar dapat menggunakan obat secara baik dan tepat. Apoteker juga harus bisa menjamin obat yang beredar di masyarakat agar dapat berkualitas baik dan aman dikonsumsi. Demikian pesan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Harsoyo, saat mengambil sumpah 100 apoteker lulusan prodi Profesi Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UII, di Yogyakarta,

Rabu [4/3]. Hingga saat ini, UII telah meluluskan 2.427 apoteker. Harsoyo mengatakan, Indonesia masih dihadapkan berbagai masalah di bidang kefarmasian. Banyak obat palsu dan ilegal yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Menurutnya, saat ini peran apoteker menjadi sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar

lebih memahami secara utuh cara penggunaan obat yang sebenarnya. Ia mengatakan, sinergitas antara apoteker dengan pemerintah adalah hal yang penting. Ketua Komite Farmasi Nasional (KFN) Purwadi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Nurul Falah Eddy Pariang mengatakan, pada 2012, WHO mencatat 450 ribu kasus *multidrug resistance tuberculosis* (MDR TB) baru. ■ heri purwata **ed:** andi nur aminah

Banten Wacanakan Replikasi BOS

SERANG — Pemerintah Provinsi Banten mewacanakan membuat replikasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini untuk mengantisipasi bantuan yang bersumber dari APBN tersebut dihentikan. "Kita harus mengantisipasi dengan mulai berpikir untuk membuat replikasi BOS ke depan. Karena, khawatir nanti dari APBN ini dihentikan seperti halnya PNPM Mandiri," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, [4/3].



Gerakan Membaca

Pelajar SD, SMP, SMA 1 Bekasi bernyanyi saat mengikuti deklarasi Gerakan Ayo Membaca Indonesia di Islamic Book Fair (IBF) ke-14, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu [4/3]. Gerakan ini untuk mengajak meningkatkan minat baca buku kepada anak-anak Indonesia.

Perpecahan Partai

■ FIRMAN NOOR

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Perpecahan partai tengah melanda dua partai lawas, Golkar dan PPP, yang menyebabkan hadirnya kepengurusan kembar. Jika dilihat dari kacamata sejarah, fenomena perpecahan itu bukan hal baru, bahkan sebelumnya telah melanda banyak partai sejak awal reformasi.

Sepintas, akar persoalan perpecahan yang dialami oleh partai-partai itu berbeda. Namun dalam beberapa hal, penyebab perpecahan menjadi klasik karena melibatkan faktor yang hampir sama.

Persoalan pertama yang kerap menjadi pemicu di balik munculnya faksionalisasi adalah penafsiran akan aturan main yang tidak seragam. Dalam sebuah momen krusial, masing-masing pihak merasa mereka yang paling konsisten dan teguh atas konstitusi atau aturan main.

Perbedaan penafsiran itu muncul sebagai respons atau reaksi dari manuver politik yang dianggap tidak biasa atau kontroversial. Hal ini, misalnya, dipicu oleh upaya seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pendekatan politik kepada pihak tertentu, seperti saat Suryadharma Ali menggadang-gadang Prabowo Subianto di PPP atau saat dulu Matori Abdul Jalil mendukung pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dalam pemakzulan Gus Dur di PKB.

Pemicu lainnya adalah kebijakan memajukan atau memundurkan pelaksanaan pergelaran politik penting, seperti saat Hamzah Haz yang memundurkan Muktamar PPP yang memicu protes kelompok Zainuddin MZ—belakangan membentuk PBR—atau seperti yang terjadi di Golkar saat ini, di mana persoalan pelaksanaan waktu munas menjadi salah satu inti persoalan. Kemudian, merambat pada kecurigaan atas motif manuver itu.

Di sisi lain, perbedaan penafsiran aturan main itu merembet pada soal-soal sensitif yang mengusik legitimasi kepemimpinan partai. Pertanyaan seperti sebesar apa kewenangan seorang ketua umum itu dapat digunakan, apakah forum keputusan itu tepat atau tidak, adalah pertanyaan yang kerap digunakan untuk melabeli sebuah kelompok sebagai otoriter, oportunis, pragmatis, atau inkonstitusional yang akhirnya memanaskan situasi.

Perbedaan penafsiran ini mengindikasikan setidaknya dua hal, yakni aturan main (atau tafsirannya) itu sendiri yang masih menyisakan celah perdebatan dan atau tak adanya kesepahaman yang disosialisasikan secara kontinu dan konsisten sehingga setiap kader memiliki pema-

haman yang sama atas aturan main.

Kesemua perdebatan ini sayangnya kerap tidak disalurkan pada media penyelesaian konflik yang tepat. Sudah menjadi rahasia umum manajemen konflik di kebanyakan partai tidak terlembaga dengan baik. Akibatnya, banyak keputusan terkait penyelesaian konflik yang tidak disadari oleh tahapan penyelesaian konflik tertulis yang detail, terstandardisasi, dan dengan institusi pelaksana yang sah dan berwibawa.

Pada masa lalu, badan peradilan internal jarang secara detail disebutkan perannya di AD/ART. Saat ini, meski situasi lebih baik, kenyataannya walau telah disebutkan di AD/ART, kerap badan-badan peradilan internal—apakah itu badan arbitrase, dewan syariah, atau mahkamah internal—sekadar ada dan dalam praktiknya sarat kepentingan yang menyebabkan legitimasi dan tingkat kepercayaan kader atas badan-badan ini rendah.

Cerita yang umum terjadi, penyelesaian konflik akhirnya bersifat subjektif dengan semangat *like-dislike*. Situasi ini menyebabkan keputusan yang ditetapkan dinilai parsial, tidak otoritatif, dan membangkitkan ketidakpuasan. Muncul kemudian tuduhan keputusan itu tidak didudukkan pada itikad baik dan upaya penyelesaian yang taat prosedur. Dan atas dasar inilah, sebuah faksi atau kelompok merasa berhak mempertahankan eksistensinya hingga kepentingan-nya terwujud.

Hal lain yang menarik adalah mengapa manakala konflik dirasa semakin tak terjembatani, sebuah faksi dapat membentuk kepengurusan sedemikian cepat. Setiap pihak yang bertikai, baik di PPP maupun Golkar (dulu juga PKB), mengklaim memiliki kepengurusan yang lengkap dan sah hingga di daerah.

Penyebab mendasar adalah karena adanya “soliditas semu” di partai-partai itu, yang memungkinkan kader atau simpatisan mudah sekali direkrut mendukung kelompok tertentu dengan iming-iming pragmatis sebagai kompensasinya.

Kerap pula terjadi manipulasi untuk mengokohkan eksistensi kelompok. Untuk alasan ini, masing-masing kelompok yang bertikai kerap menggunakan “kewenangannya” untuk merekrut dan mendudukkan seseorang pada jabatan tertentu. Akibatnya, banyak orang tak dikenal yang tiba-tiba menduduki sebuah jabatan di pengurus daerah. Di sini, jelas aturan main lagi yang dikorbankan.

Perilaku di atas mengindikasikan elite maupun kader partai kurang merasa terpenggil untuk mendahulukan upa-

ya menyatukan barisan dengan bersikap kritis atas ajakan kelompok tertentu membentuk faksi. Orientasi politik dan loyalitas lebih ditujukan kepada figur atau kelompok dan bukan pada partai. Sikap ini muncul sebagai hasil dari hilangnya nilai-nilai pemersatu yang ditaati kader. Penyebab utamanya jelas, yakni tidak bekerjanya internalisasi ideologi seiring dengan, sekali lagi, mati surinya kaderisasi.

Dengan situasi seperti ini—redupnya kaderisasi yang berujung hilangnya soliditas dan munculnya multitafsir atas aturan main dan juga strategi, serta pelembagaan manajemen konflik yang lemah—menyebabkan ambisi individu, terutama mereka yang masuk kategori elite dalam partai dapat meluas secara tidak terkontrol, menguat, dan akhirnya mendorong pertikaian tidak sehat yang berujung pada faksionalisasi.

Dalam beberapa kasus, perpecahan partai juga semakin kompleks dengan adanya intervensi pihak luar, baik langsung maupun tidak langsung. Pihak luar bisa lembaga nonpemerintah, seperti serikat buruh, pemilik modal, atau kelompok agama berpengaruh. Namun, dapat pula dari pihak pemerintah, termasuk lembaga peradilan.

Dalam banyak kasus di Indonesia, perpecahan parpol diperburuk lebih oleh sikap pemerintah. Pada masa Orde Baru, pertarungan faksi di partai diperumit kepentingan rezim untuk menanam atau memperkuat orang-orang yang dianggap pendukung rezim. Di era Reformasi, kisruh PKB sedikit banyak diperuncing atau diperlama dengan keputusan pengadilan yang kabur, yang memungkinkan masing-masing pihak menafsirkan sebagai pembenaran atas keberadaannya.

Dalam kasus PPP dan Golkar, konflik internal turut “dimeriahkan” dengan sikap intervensionis pemerintah. Sikap pemerintah itu menyebabkan ada pihak yang merasa mendapat angin dan sah untuk eksis. Meski sebenarnya peluang pencarian penyelesaian atau islah belum tertutup, sikap pemerintah yang memberi angin ini kerap meninggikan kecurigaan dan mengentalkan pengubun. Apalagi, tak tertutup kemungkinan adanya kepentingan pemerintah memenangkan kelompok yang ramah rezim.

Namun, akar persoalan jelas bukan ada pada pihak eksternal. Berbagai intervensi itu hanya memainkan peran sekunder. Dan, jelas hal itu tidak akan muncul jika partai-partai yang bertikai sejak dini meredam dan menyelesaikan konflik secara mandiri dengan elegan. ■

tajuk

Antisipasi Kemarau

Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ihwal musim kemarau penting diperhatikan. Lembaga tersebut memperkirakan bahwa puncak kemarau tahun ini akan jatuh pada Juli mendatang. Sejak Juni, sebanyak 85 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim tersebut.

Yang menggembirakan, Kepala BMKG Andi Eka Sakya menyebutkan bahwa musim kemarau kali ini tidak akan mengganggu musim tanam. Paling tidak pernyataan ini memberikan gambaran bahwa pasokan pangan dan harganya tidak akan terganggu datangnya kemarau.

Biasanya, kemarau identik dengan kelangkaan bahan pangan yang menyebabkan harganya pun melambung. Lebih parah lagi, kemarau juga kerap dimanfaatkan oleh para mafia pangan untuk memainkan harga di pasaran. Mereka berusaha memanfaatkan kemarau untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli dengan beban berat masyarakat.

Prakiraan puncak kemarau yang sudah disampaikan sejak dini, semestinya menjadi catatan penting bagi semua pihak yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan prakiraan tersebut, masing-masing pihak juga semestinya bisa menyiapkan langkah antisipasinya sedini mungkin. Dengan begitu, dampak negatif yang biasa ditimbulkan oleh hadirnya puncak kemarau bisa diminimalkan.

Imbauan Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Winny Dian Wibawa, agar petani mempercepat musim tanam perlu menjadi upaya alternatif untuk mengantisipasi dampak negatif puncak kemarau. Dengan percepatan ini diharapkan petani sudah memanen tanamannya sebelum datangnya puncak kemarau.

Selain terkait pasokan bahan makanan, pada musim kemarau juga selalu diwarnai kebakaran hutan yang asapnya menjangkau Malaysia dan Singapura. Akibatnya, pemerintah pun selalu disibukkan untuk menjawab protes dari kedua negara tersebut atas kiriman asap kebakaran hutan. Di mata internasional, musibah kebakaran hutan inipun menjadi arang yang mencoreng wajah Indonesia.

Lebih parah lagi, asap kebakaran hutan juga menjadi gangguan serius bagi penerbangan dan terganggunya aktivitas masyarakat. Dalam banyak kejadian, asap kebakaran hutan menjadikan banyak penerbangan dihentikan. Kegiatan masyarakat pun seperti belajar-mengajar, layanan publik, aktivitas ekonomi juga kerap terhenti akibat asap kebakaran hutan. Selanjutnya, gangguan pernapasan menjadi ancaman kesehatan yang serius bagi masyarakat akibat kejadian tersebut.

Dengan diumumkan sejak dini, kita berharap penanganan atau antisipasi puncak kemarau tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Puncak kemarau adalah kejadian yang selalu hadir setiap tahun. Terkadang puncak kemarau memang datang berkepanjangan, tapi juga sesekali datang hanya sesaat dan langsung disusul musim penghujan.

Karena sudah hadir rutin, pihak-pihak yang terkait langsung dengan antisipasi dampak buruk cuaca ini bisa terus menyempurnakan programnya secara lebih baik. Dengan demikian, makin tahun dampak buruk puncak cuaca bisa ditekan lebih maksimal. Masyarakat juga secara massal bisa terus diedukasi untuk menyiapkan dirinya secara lebih baik dalam menghadapi momentum tersebut. ■

suarapublika

Mewaspada! Bahaya Demam Batu Akik

Demam batu akik melanda masyarakat negeri ini. Batu akik selalu menjadi bahan perbincangan, dari anak-anak hingga orang tua.

Layaknya primadona, kini batu akik menjadi incaran banyak orang. Wajar jika harga batu akik bahkan bisa mencapai angka jutaan rupiah. Berapa pun harganya akan dibeli, demi kepuasan sesaat saja.

Jika diperhatikan bersama, demam batu akik memberi beberapa dampak negatif bagi masyarakat. Pertama, masyarakat menghabiskan waktu dan pikirannya untuk sesuatu yang tidak begitu penting. Hanya untuk memenuhi kepuasan batin sesaat saja, mengikuti tren.

Akibatnya, fungsi kontrol sosial oleh masyarakat pun menghilang karena perhatian masyarakat tidak lagi banyak tercurah pada urusan urusan umat yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka. Seperti masalah meroketnya harga beras, migas, dan layanan publik yang mengecewakan.

Kedua, masyarakat cenderung boros. Mereka rela menghabiskan uang yang tidak sedikit hanya untuk membeli batu. Ketiga, ada di antara masyarakat yang tak fokus menjalankan kewajiban atau pekerjaan karena pikirannya terbagi dengan pikiran pada batu akik.

Keempat, berbahaya jika kolektor atau penggemar batu akik mempunyai pikiran mistis atau dalam Islam syirik. Inilah beberapa dampak negatif dari demam batu akik yang melanda masyarakat.

Siti Wachidatun

Desa Waluyo, Buluspesantren, Kebumen, Jawa Tengah

Derita Pasien BPJS

Sungguh miris mendengar berita, seorang bayi perempuan yang baru lahir meninggal di rumah sakit, Cikarang, Bekasi, awal Februari lalu, yang ditahan selama empat hari oleh pihak rumah sakit disebabkan orang tua si bayi belum bisa melunasi biaya persalinan.

Pihak keluarga pasien amat kecewa dengan tindakan dan alasan pihak rumah sakit menahan bayi yang telah meninggal tanpa menyerahkan ke pihak keluarga. Padahal saat bayi dilahirkan, kondisi bayi masih sehat, tapi tidak demikian ketika hendak dibawa pulang, kondisi bayi sudah tidak bernyawa lagi.

Pasien yang melahirkan di rumah sakit ini merupakan anggota BPJS yang tentunya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, apalagi pasien baru melahirkan dan kehilangan bayinya. Ternyata, menjadi anggota BPJS tidak menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi anggotanya, tetapi hanya memberi pertanggungjawaban sesuai jumlah yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.

Jelas-jelas negara mengabaikan kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Lagi-lagi rakyat tidak mendapat jaminan itu yang merupakan hak bagi mereka. Namun, ada pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan semata dalam program jaminan kesehatan ini.

Devi Widayati

Perum Taman Sedayu III, Argorejo, Sedayu, Bantul

REPUBLIKA

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor pemberuan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya pengutaraan, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseimbangan baru dalam tata

Pemimpin Redaksi/Penangggung Jawab:

Nashin Masha

Wakil Pemimpin Redaksi:

Irfan Junaidi

Redaktur Pelaksana Koran:

Subroto

Redaktur Pelaksana Newsroom:

Elba Damhuri

Redaktur Pelaksana Online:

Maman Sudaman

Redaktur Khusus:

Ikhwani Kram Masyhuri

Reporter Senior:

Harun Nuseh, Muhammad Subarkah, Nurul S. Hamami, Setama I Ginting, Siwi Tri Puji Budiyetji, Rakhmat Hadi Supripto.

Kepala Desain: Sarjono. Kepala Infografis: Muhammad Ali Imron.

Kepala Bahasa: Abdul Sahal.

Staff Redaksi:

Alvi Shafeeb, Syafruddin El-Fikri, Andi Nur Aminah, Andri Saubani, Anjar Fahmianto, Asep K. Nur zaman, Budi Raharjo, Chairul Akhmad, Dewi Mardani, Didi Purwadi, Endro Yuwono, Ferry Kusaband, Firman Zamzami, Hari Purwito, Indra Reksasari, Irwan Katana, Israr, Khairul Arifin, Nashin Masyhuri, Nuzulita Endah Hapsari, Nida Zuraya, Nina Chairani Ibrاهيم, Musiron, Ratna Puspiita, Reiny Dwiandana, R Heru Muhammad, Taufiqurrahman Bachdrali, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Yeyen Rosyiani, Yogi Ardhi Cahyadi, Zakky Al Hamzah, Edwin Dwi Putra, Abdulloh Sammy, Agus Raharjo, Ahmad Ismail Jamil, Amri Amrullah, Anri Nursalikah, A Syelaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Bowo Priyadi, Citra Listya Rini, Damenthuri Zuhri, Darmawan, Desy Susilawati, Djoko Suchoo, Dwi Mardaningah, Dyah Ratna Meia Novia, Edi Selyoko, Eko Widayanto, Erdy Nasrud, Erik Purnama Putra, Esbi Maharani, Fernan Rahadi, Friska Yolanda, Ihsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Irfan Firat Priyadi, Lili Sani Handayani, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Muhammad Akbar Wijaya, Muhammad

Direktur Utama:

Erick Thorir

Wakil Direktur Utama:

Mira Rahardjo Djarto

Direktur Operasional:

Arys Hilman Nugraha

Komisaris Utama:

Adi Sasono

Komisaris:

R Harry Zulnardy

GM Keuangan:

Didik Irianto

GM Marketing dan Sales:

Yulianingsih Yamin

Manajer Iklan:

Indra Wisnu Wardhana

Manajer Produksi:

Nurrokhim

Manajer Sirkulasi:

Harjadi B Susanto

DINAMIKA >>

Pabrik Serbuk Gergaji di Serang Disegel

SERANG — Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kota Serang menyegel sebuah pabrik eksportir yang memproduksi serbuk gergaji, yang berada di Kampung Sukabela, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang Banten, karena mengganggu warga serta tidak memiliki izin usaha.

Menurut Kepala Satpol PP Kota Serang Akhmad Mujimi, penyegelan ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan pa-

brik. "Kami lakukan penyegelan karena warga resah dengan keberadaan pabrik ini terutama limbahnya. Dan ternyata, setelah diselidiki pabrik ini juga tidak mengantongi izin," kata Mujimi, Rabu (4/3).

Mujimi menjelaskan, gedung pabrik tersebut awalnya merupakan gedung Koperasi Unit Desa (KUD). Akan tetapi, sejak tiga tahun lalu gedung tersebut berubah fungsi menjadi pabrik dan memproduksi serbuk gergaji.

Camat Kasemen Subagyo mengatakan, sebelumnya pabrik tersebut memproduksi kopra kemudian briket. Akan tetapi, kemudian menjadi pabrik pengepakan limbah gergaji. "Warga mengaku terganggu dengan aktivitas pabrik ini karena limbah asapnya yang membuat gatal-gatal warga," ujarnya.

Subagyo mengatakan, warga di sekitar pabrik sebelumnya tidak mengetahui pabrik tersebut memproduksi barang apa.

■ c81 ed: andri saubani

Gunung Tambora Diusulkan Sebagai Geopark

MATARAM — Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengusulkan Gunung Tambora sebagai Geopark Nasional. Alasannya, di Gunung Tambora terdapat belasan situs-situs budaya, biologi, dan geologi.

"Diusulkan tahun ini ada belasan *geosite* di Tambora dari tiga keragaman biologi, budaya, dan geologi," ujar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Muhammad

Husni, Rabu (4/3).

Husni menuturkan, saat ini pihaknya dibimbing ahli geologi tengah melakukan inventarisasi *geosite* di Gunung Tambora. Inventarisasi *geosite* itu dalam rangka pengusulan Gunung Tambora sebagai Geopark Nasional.

"Melakukan inventarisasi *geosite* dalam rangka pengusulan Tambora sebagai Geopark Nasional," ungkapnya.

Menurutnya, *geosite* di Gunung Tambora tidak jauh ber-

beda seperti di Gunung Rinjani, di antaranya, air terjun. Husni menambahkan, dalam rangka Festival Tambora Menyapa Dunia, Distamben NTB akan memasang tanda kawasan rawan bencana di beberapa tempat lokasi kegiatan.

Selain itu, juga akan dibangun 150 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di Desa Oibura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Satu keluarga akan menerima satu unit PLTS. ■ c75 ed: andri saubani

Banyak Warga NTB Belum Nikmati Listrik

PLN diminta membangun pembangkit listrik tidak berbahan bakar minyak.

MATARAM — Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin, kedatangan anggota Komisi VII DPR dari daerah pemilihan NTB, Kurtubi. Legislator yang juga pengamat energi ini menyatakan, kondisi kelistrikan di NTB masih sangat memprihatinkan dibandingkan dengan provinsi lain.

"Indikatornya, rasio elektrifikasi sekitar 67 persen masih rendah dibandingkan daerah lain yang mencapai 80 persen," kata Kurtubi, saat berkunjung ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB, Rabu (4/3).

Menurut Kurtubi, masih rendahnya rasio elektrifikasi di NTB berdampak pada masih banyaknya keluarga di NTB yang belum menikmati listrik. Selain itu, menurutnya, kualitas listrik yang sudah mengalir di berbagai rumah yang ada masih kurang, disebabkan masih sering adanya pemadaman.

Biaya pokok membayar listrik di NTB juga terbilang mahal karena mencapai Rp 3.500/kWh. Padahal, harga jual listrik hanya Rp 900.

"Tingginya biaya listrik di NTB karena sebagian besar listrik berbahan baku BBM. Artinya, pemerintah pusat menyubsidi Rp 2.000 lebih dan itu sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Karenanya, kata Kurtubi, Komisi VII DPR mendorong agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera membangun kapasitas pembangkit listrik yang baru. Pembangkit listrik baru nanti diharapkan tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Kurtubi juga meminta PLN bisa menurunkan biaya pokok listrik.

Salah satu cara menekan biaya pokok listrik, kata Kurtubi, yakni PLN memanfaatkan potensi bahan baku

panas bumi yang ada di Sembalun, Lombok Timur. Selain itu, ke depannya PLN diharapkan bisa menggunakan pembangkit listrik dengan tenaga bio massa dengan bahan baku pohon kayu. Di mana, untuk wilayah Pulau Lombok bisa menggunakan pohon turi sebagai bahan baku listrik. "Jangan sampai masalah listrik yang sebenarnya kita tahu solusinya membuat masyarakat jadi menderita. Solusi ini didorong harus segera dipercepat," katanya.

Terkait dengan PLTU Jeranjang di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kurtubi melanjutkan, pihaknya mendesak dan menegur PT Barata Indonesia agar segera menyelesaikan PLTU tersebut. Jika perusahaan itu tidak mampu melanjutkan proyek itu, maka PLN harus mengambil alih proses pembangunan dan operasionalisasi PLTU Jeranjang. Menyangkut pemadaman listrik di Pulau Sumbawa, pihaknya mendesak PT Newmont Nusa Tenggara untuk segera menjual kelebihan kapasitas listriknya kepada PLN.

Kepala Distamben NTB Muhammad Husni mengatakan, pihaknya terus mempercepat program pengaliran listrik kepada rumah tangga yang tidak terjangkau oleh PLN. Salah satu caranya adalah dengan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Setiap rumah, kata Husni, akan mendapatkan satu unit PLTS.

Selain itu, Husni melanjutkan, pihaknya bersama PLN telah melakukan pemasangan instalasi listrik gratis untuk 1.680 unit rumah pada 2014. Sementara, PLN juga telah memasang instalasi listrik untuk 3.500 rumah yang berasal dari APBN. Untuk tahun 2015 ini, Distamben NTB akan melakukan pemasangan instalasi listrik untuk 2.060 unit rumah masyarakat tidak mampu. "Dasar pemilihan masyarakat tidak mampu berdasarkan penerimaan raskin," ungkap Husni.

■ c75 ed: andri saubani

Jangan sampai masalah listrik membuat masyarakat jadi menderita.



Kunjungan Pulau Terluar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan ke Pulau Batu Berteuah yang merupakan salah satu pulau kecil terluar di daerah Lampung, Rabu (4/3). Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memfasilitasi dan mengeluarkan peta jalan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar secara berkelanjutan.

Wali Kota Bantah KP3S Makassar Ditolak Pusat

■ Debbie Sutrisno

MAKASSAR — Wali Kota Makassar M. Ramdhan Pomanto membantah anggapan adanya penolakan pembentukan Komisi Percepatan dan Pengendalian Program Strategis (KP3S) ditolak pemerintah pusat. Namun, Ramdhan mengakui, dirinya menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi. "Surat yang kami kirim ke Menpan-RB itu pengusulan eselonisasi KP3S. Jadi, bukan keberadahan KP3S yang ditolak," ujar Ramdhan, Rabu (4/3).

Melalui surat Kemenpan-RB nomor B/730/MPAN-RB/2/2015 per tanggal 26 Februari yang diterima, Rabu (4/3), pemerintah pusat menilai bahwa pembentukan KP3S dari aspek legal tidak memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan. Dalam poin kedua surat yang juga ditandatangani Menpan-RB Yuddy Chrisnandi menjelaskan pengaturan dasar organisasi perangkat

daerah telah diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 209 Ayat (2) UU 23 Tahun 2014, ditetapkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Menanggapi hal ini, Ramdhan menyatakan, KP3S dibentuk selayaknya seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki pejabat eselon II. Tujuannya, agar seluruh fasilitas pejabat KP3S bisa setara dengan fasilitas saat mereka menjabat sebagai kepala SKPD.

Ihwal legalitas pembentukan KP3S, menurut Ramdhan, dasar pembentukannya, yakni Undang-Undang Otonomi Daerah, setiap kepala daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk sebuah tim demi menjalankan program pemerintahan daerah. Ia juga menilai KP3S tidak ada bedanya dengan Ombudsman atau lembaga pemantau independen lain. "Kami tetap

yakin KP3S ini akan menjadi lembaga khusus untuk membantu percepatan program-program strategis," kata Ramdhan.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar Ibrahim Saleh mengklaim, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenpan-RB. Sejak awal pembentukan, kata Ibrahim, KP3S bersifat *ad hoc*, yang artinya lepas dari kelembagaan pemerintah daerah. "Mereka tidak permasalahan kalau ada komisi yang membantu pemerintah kota dengan beranggotakan PNS. Asalkan, bersifat *ad hoc*. Dan, kita lakukan itu pada KP3S," ujar Ibrahim.

Ibrahim menerangkan, dalam surat keputusan (SK) yang diberikan saat pelantikan, tidak pernah disebutkan bahwa anggota KP3S sejajar dengan pejabat eselon II. Namun, mereka akan disetarakan dengan eselon II. Mengenai tunjangan jabatan maupun fasilitas yang akan diberikan pemerintah kota terhadap anggota KP3S bakal menjadi hak daerah sesuai dengan kemampuan APBD. ■ ed: andri saubani

Anggaran Fasilitas Rumah Sekda Banten Diduga Di-markup

SERANG — Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas interior rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Banten berjumlah Rp 405 juta, diduga bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun 2015. Jumlah anggaran yang fantastis menjadi dasar dugaan pelanggaran.

Menurut aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten, Mukhtar Ansori Attijani, penganggaran fasilitas interior rumah dinas

Sekda Banten telah melanggar peraturan yang ada. Dari komposisi anggaran yang disusun oleh Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten, kata Mukhtar, terlihat jelas niat untuk melanggar hukum dengan mengalokasikan anggaran yang begitu fantastis.

"Ini merupakan praktik *mark-up* anggaran dan masuk kategoritindak pidana korupsi. Karena itu, pejabat terkait di Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten harus diproses secara hukum," kata Mukhtar, Rabu (4/3).

Mukhtar mencontohkan, dalam Pergub Banten Nomor

29 Tahun 2014 diatur bahwa standar tertinggi harga ranjang, yakni Rp 13.856.100. Namun, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dibuat Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten, anggaran satu set ranjang untuk rumah dinas Sekda Banten mencapai Rp 70 juta. "Anggaran yang dibuat Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten lebih mahal empat kali lipat," ujar Mukhtar.

Barang interior lainnya yang diduga digelembungkan anggarannya, yakni untuk pembelian lemari pakaian. Dalam Pergub 29/2014 diatur

harga maksimal lemari pakaian, yaitu Rp 11.673.000, namun realisasi pembeliannya mencapai Rp 28.200.000. "Untuk *exhaust fan*, harga yang dianggarkan Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten sebesar Rp 800.000. Padahal, dalam pergub tersebut itu telah diatur bahwa harga tertinggi *exhaust fan* hanya sebesar Rp 773.500," kata Mukhtar.

Menurut Mukhtar, Sekda Banten selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seharusnya memeriksa terlebih dahulu anggaran yang dibuat oleh Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten.

Sehingga, terjadi efisiensi anggaran sebelum dicairkan. "Namun, faktanya, sejumlah barang untuk fasilitas rumah dinas Sekda Banten tersebut sudah dibelanjakan dan sebagian besar harganya bertentangan dengan pergub yang ada."

Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten Joko Sumarsono mengakui, pengadaan barang untuk fasilitas interior rumah dinas Sekda Banten berdasarkan usulan dari Biro Umum Pemprov Banten. Menurut Joko, anggaran pengadaan interior dan sewa rumah dinas Sekda Banten tidak diambil dari APBD

Banten 2015. Namun, dianggarkan melalui mekanisme pergeseran anggaran kegiatan sejenis di Biro Perlengkapan dan Aset serta Biro Umum Pemprov Banten.

Joko mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas interior rumah dinas Sekda Banten senilai Rp 405 juta tidak seluruhnya terserap. Jumlah anggaran yang terserap untuk pengadaan fasilitas interior rumah dinas Sekda Banten, Joko mengungkapkan, yakni Rp 140.375.000. "Sisa anggaran sebanyak Rp 264.625.000," ujar Joko. ■ c81 ed: andri saubani



Mereka bertiga masuk rumah dan duduk di ruang tamu.

"Saya buatkan mi, num ya, Hoca? Di dapur juga masih ada *shortbread*," kata Paman Hulusi.

"Boleh, paman. Nanti agak siang sedikit kita sama-sama pergi ke Resto Agnina."

"Baik, Hoca." Paman Hulusi bangkit ke dapur.

"Jadi kapan mau jumpa supervisorormu, Bah?"

"Tadi malam saya sudah email beliau. Saya juga sudah SMS beliau minta waktu, kapan bisa jumpa. Saya menjelaskan secara singkat, saya akan ikut pindah ke Edinburgh dan saya saat ini posisi sedang ada di Edinburgh. Saya sedang menunggu jawaban beliau

"Terus apa rencanamu, untuk hari ini dan besok?"

"Sebenarnya, rencana saya setelah melihat Edinburgh, saya ingin jalan ke Stirling, lalu Glasgow, terus mengunjungi Loch Lomond. Dari Loch Lomond baru balik arah pulang ke Bangor. Namun lebih dulu saya akan mampir Lancaster, Manchester, dan Liverpool. Itu rencana jalan-jalan saya sebelum pulang ke Indonesia untuk selamanya. Namun setelah jumpa Mas Fahri, jelas berubah rencana. Hari ini dan besok saya di Edinburgh saja, siapa tahu tiba-tiba supervisor memberi waktu bertemu. Saya juga ingin sedikit merevisi draf terakhir tesis saya. Lebih enak kalau jumpa supervisor sambil membawa hasil. Jadi tampak kerjanya."

pang nge-print."

"Di rumah ini ada *printer*."

"Alhamdulillah."

Tiba-tiba sayup-sayup dari arah rumah sebelah terdengar suara gesekan biola. Fahri berusaha mengenyahkan nada-nada itu. Tapi suara nada itu begitu jelas. Fahri memejamkan mata. Dari sudut kedua matanya air matanya merembes.

"Kenapa, mas?"

"Suara biola itu. Itu nada *Viva La Vida*, yang sering dimainkan Aisha," Fahri menarik nafas.

"Hoca Fahri belum bisa lupa-pakan Aisha *Hanem*. Beberapa hari ini gadis tetangga sebelah menggesek biola, nadanya persis yang dimainkan Aisha *Hanem*. Itu selalu membuat Hoca Fahri sedih dan menangis," kata Paman

"Terus, pisah karena apa?"

"Ah, ceritanya panjang, Bah," lirih Fahri serak.

"Hoca, sebaiknya ceritakan saja pada sahabatmu ini. Mungkin cerita itu akan ada gunanya. Mungkin itu bisa sedikit mengurangi kesedihan Hoca. Atau mungkin sahabatmu bisa sedikit memberimu kalimat penglipur kalau pun bukan jalan keluar."

Fahri bangkit dari kursinya dan menatap ke jendela. Ia melihat ke halaman lalu jauh ke depan. Ia melihat beranda rumah nenek Catarina. Pelan-pelan pintu rumah itu terbuka, lalu muncullah nenek tua itu berjalan pelan dan tertatih. Ia menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Pelan-pelan ia berjalan menuruni tangga.



Kembali dari Nusakambangan

Personel polisi dengan menggunakan Kapal Pengayoman IV kembali dari lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah setelah mengantarkan dua terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Rabu (4/3).

Serangan pada KJRI Diminta Diusut

■ Dessy Suciati Saputri, Halimatus Sa' diyah

Indonesia-Australia harus bijak soal eksekusi terpidana mati narkoba.

JAKARTA — Pemerintah Indonesia meminta Australia mengusut tuntas kasus serangan terhadap KJRI di Sydney. Pada Selasa (3/3) pagi, cairan serupa darah berceceran di pintu gerbang KJRI. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang perempuan melakukan aksi serangan ini.

Diyakini, aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan semakin dekatnya eksekusi mati dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kepala Badan Intelijen Negara BIN Marciano Norman mengatakan, Indonesia mendesak Australia melakukan pengusutan secara tuntas.

Selain itu, Indonesia meminta bantuan pengamanan di KJRI dari

kepolisian setempat. “Kami meminta dinas intelijen dan Kepolisian Australia mencari pelaku dan memberikan dukungan keamanan bagi KJRI,” kata Marciano, Rabu (4/3).

Pemerintah, kata Marciano, akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian Australia yang sedang bekerja mengungkap kasus teror itu. Dia juga menyebutkan, Presiden Joko Widodo meminta agar perwakilan Indonesia di Australia memperoleh jaminan keamanan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, teror itu merupakan bentuk ketidakpuasan terkait putusan eksekusi mati. “Jadi sebenarnya itu tanda ketidakpuasan saja. Itu biasa saja,” kata Kalla di Kantor Wapres, kemarin.

Menurut dia, bentuk protes seperti itu sering terjadi di negara mana saja. Ia pun mencontohkan saat Malaysia akan menghukum mati warga Indonesia, masyarakat meluapkan rasa ketidakpuasannya dengan melakukan pelemparan.

Kalla menyerahkan sepenuhnya pengamanan KJRI di Sydney dan

seluruh perwakilan Indonesia di Australia kepada aparat keamanan setempat. Menurut dia, meski ada insiden di KJRI, pelaksanaan hukuman mati tetap berjalan.

Di sisi lain, Australia tetap menekan Pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya. Terakhir, ungkap Kalla, Menlu Australia Julie Bishop melakukan pembicaraan dengan Menlu Retno Marsudi mengenai putusan eksekusi mati.

Menlu Indonesia menjelaskan bahwa ini posisinya yang memutuskan bukanlah Presiden, melainkan pengadilan. Karena, penetapan hukuman berada di ranah hukum. Selain Australia, kata Kalla, negara lainnya juga menempuh lobi yang sama.

Mereka meminta ada pengampunan dari Indonesia atas warganya yang masuk dalam daftar eksekusi. Terkait dampak dari eksekusi mati, Wapres mengatakan, Pemerintah Australia tak berencana menarik dubesnya dari Indonesia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edy Purdijatno

menilai ancaman dan teror terhadap KJRI di Sydney merupakan kejadian wajar. “Ah biasa saja, kayak kita *ngelempar* telur busuk *gitu kan sama aja*.”

Kendati demikian, Tedjo pun mengimbau agar WNI yang berada di Australia untuk tetap waspada. “Ya waspada, hati hati saja, tapi tidak ada apa-apa,” imbau dia.

Sementara, KJRI Sydney telah mengimbau seluruh warga Indonesia yang ada wilayah Sydney dan sekitarnya agar tenang dan terus berhati-hati. “Kami meminta mereka saling menjaga sambil tetap menjalankan kegiatan rutin masing-masing,” kata Konsul Jenderal KJRI Sydney Yayan GH Mulyana.

Bersikap bijak

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai Pemerintah Australia harus bijak menyikapi eksekusi mati dua warganya. Sebab, menurut dia, isu ini murni soal penegakan hukum dalam kondisi peredaran narkoba yang sudah kritis di Indonesia.

“Jangan sampai di masa pemer-

intahan PM Tony Abbott justru hubungan bilateral Australia dan Indonesia menjadi rusak dan terputus karena sikap berlebihan dan tidak bijak,” ujar Mahfudz saat dihubungi *Republika*, Rabu (4/3).

Mahfudz menambahkan, Pemerintah Indonesia pun harus berlaku bijak dalam proses penegakan hukum kasus kejahatan narkoba tanpa harus demonstratif. “Yang penting *kalem* tapi tegas,” ujar dia. Dengan demikian, tak menimbulkan gejolak.

Eksekusi terpidana mati narkoba ini sempat memicu ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia dan Brasil. Pemerintah Australia mengungkit bantuan tsunami untuk Aceh pada 2004 *sembari* meminta pengampunan bagi kedua warganya.

Sedangkan Brasil, menolak duta besar Indonesia yang akan bertugas di sana, sebagai protes karena warganya masuk dalam daftar eksekusi dalam waktu dekat ini. Pada eksekusi pertama, 18 Januari 2015, seorang warga Brasil juga dihukum mati.

■ e15 ed: ferry kisihandi

Bali Tegas Berantas Narkoba

■ Mutia Ramadhani

DENPASAR — Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali menegaskan, tak ada ampun bagi pengedar narkoba. Pemerintah konsisten untuk

rinya meninggal karena narkoba di Indonesia. Hasil penemuan BNN Bali menunjukkan jenis narkoba yang beredar semakin beraneka ragam.

Menurut Artana, jika dulu orang hanya mengenal ekstasi, sabu-sabu, ganja, dan kokain

sakambangan. Mereka menunggu saat-saat pelaksanaan hukuman mati atas dirinya. Setelah keduanya dikirimkan ke Nusakambangan, pasukan pengamanan mereka kembali ke markas.

Ratusan personel peng-



Alumni Desak KPK Ajukan PK

■ Mas Alamil Huda

Mantan komisioner menyatakan, KPK masih bisa mengambil alih kasus BG dari Kejaksaan.

JAKARTA — Mantan komisioner dan pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mendesak lembaga antikorupsi itu tak mundur soal penanganan kasus dugaan gratifikasi Komjen Budi Gunawan (BG). Mereka menginginkan KPK tetap mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka atas Budi Gunawan.

“Semua (alumni) sudah setuju, semua hadirin mengusulkan PK. Tapi, putusan ada di pimpinan, mereka yang akan memutuskan,” kata mantan komisioner KPK Abdullah Hehamahua se usai pertemuan, Rabu (4/3). Hehamahua mengatakan, meski KPK telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kepala Lembaga Pendidikan Polisi tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejak-gung), pimpinan KPK tidak boleh melepaskan kasus begitu saja.

Menurutnya, KPK mempunyai fungsi koordinasi dan supervisi dengan korps Adh-aksa tersebut. Sebab itu, Kej-akgung wajib melaporkan perkembangan penanganan kasus kepada KPK dalam bentuk gelar perkara. “Jadi, Kej-akgung tidak bisa seenaknya menyerahkan kepada kepoli-sian, tidak bisa. Harus lapor ke KPK,” ujarnya. Ia menegaskan, KPK masih mungkin kembali menangani kasus dugaan korupsi Budi Gunawan jika Kejaksaan didapati tak serius mengusut Budi Gunawan.

Atas usulan tersebut, pim-pinan KPK pun belum meng-ambil sikap. Dalam waktu de-kat, seluruh komisioner akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) untuk membahas usulan tersebut. “Terhadap usulan itu kami akan memba-hasnya di rapim,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menyusul pencalonannya se-bagai calon kapolri tunggal oleh Presiden Joko Widodo. Ia kemudian mengajukan prap-eradilan yang dikabulkan hakim Sarpin Rizaldi di PN Jakarta Selatan. Sarpin meng-anggap penetapan tersangka oleh KPK atas Budi Gunawan tak sah.

KPK sempat mengajukan

kasasi atas putusan itu namun ditolak Mahkamah Agung (MA). KPK sempat berencana mengajukan PK, namun be-lum sempat upaya hukum di-ambil, para pemimpin melim-pahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan.

Meski ikut mendorong PK, mantan komisioner yang sepe-riode dengan Ruki, Tumpak Hatorangan Panggabean, men-dukung langkah pemimpin KPK melimpahkan perkara Komjen Budi Gunawan ke Ke-jakgung. “Kasus BG dilimpah-kan ke Kejaksaan adalah suatu hal yang memang berdasar ketentuan, menurut kami tepat. Karena undang-undang mem-beri kemungkinan itu,” kata-nya di gedung KPK.

Ia juga menolak jika Ke-jakgung melimpahkan penan-ganan perkara ke kepolisian.

Di pihak lain, kuasa hu-kum Budi Gunawan, Maqdir Ismail mengatakan, Kej-ak-gung tidak perlu melimpah-kan perkara Budi Gunawan ke Polri apabila tidak meng-an-dung unsur tindak pidana umum.

“Kalau itu korupsi bisa ditangani sendiri oleh kejak-saan, kalau tindak pidana umum baru diserahkan ke ke-polisian oleh kejaksaan,” kata Maqdir.

■ antara ed: fitriyan zamzami

Puncak Kemarau Juli, Masa Tanam Dipercepat dari hlm 1

Ia mengungkapkan, ada prakiraan bahwa musim hu-jan akan datang terlambat. “Tapi, kami harus melihat lagi di mana saja sentra-sentra pa-di. Karena prakiraan di setiap lokasi berbeda,” kata Andi.

Selain perkiraan datang-nya kemarau, BMKG juga memprediksi sifat hujan di se-bagian besar wilayah Indone-sia tahun ini normal. Namun, pada Mei beberapa wilayah yang sebelumnya sudah mengalami musim ke-marau, kembali diguyur curah hujan yang tinggi.

Memperhatikan perkiraan BMKG, Kementerian Pertani-an (Kementan) optimistis pro-duksi pangan akan aman. Namun, kementerian juga mendorong agar petani mem-percepat penanaman kembali padi pascapanen.

“Awal Maret ini kita ada peluang yang bagus karena iklimnya bagus, untuk mem-percepat masa tanam ulang,” kata Plt. Kepala Badan Keta-hanan Pangan Kementan Winny Dian Wibawa kepada *Republika*, Rabu (4/3). Perce-patan tersebut utamanya dilak-ukan di sektor utama pro-

duksi beras dan wilayah ta-nam padi yang telah meneri-ma bantuan alat mesin pertani-an (alsintan).

Persoalan beras mengemu-ka sebulan terakhir menyusul harganya yang melambung tinggi. Harga beras naik sam-pai 30 persen di beberapa dae-rah. Padahal, tidak ada gang-guan pasokan beras dan stok masih banyak. Setelah harga beras meroket, Bulog baru me-respons dengan mengadakan operasi pasar serentak di ber-bagai daerah dan mengguyur beras untuk rakyat miskin (raskin). Diharapkan musim di-kemarau tahun ini tidak me-nambah lonjakan pada harga beras.

Mentan menambahkan, sebagian petani mulai mena-nam di akhir Desember dan Januari ketika belum terjadi puncak penghujan. Kementan terus berkoordinasi dengan petani terkait pengaturan ma-sa tanam. Koordinasi itu ber-dasarkan pembagian Indone-sia menjadi 342 zona musim menurut BMKG.

Zona tersebut, lanjut dia, memungkinkan Balitbang untuk menyampaikan infor-

masi, kapan sebaiknya petani mulai melakukan tanam di masing-masing daerah melai-lui Gugus Kalender Tanam Terpadu.

Asosiasi Petani Padi dan Palawija Indonesia (AP3I) menilai, iklim tanam yang dinyatakan bagus pada 2015 tak lantas membuat produksi pangan optimal. Pemerintah mesti memperhatikan aspek penting lainnya, di antaranya, sistem irigasi dan penyaluran bibit maupun pupuk. “Iklim bagus percuma kalau sistem lainnya tidak diseriusi,” kata Sekretaris Jenderal (AP3I) Arum Sabil pada Rabu (4/3).

Terkait laporan BMKG soal prediksi iklim 2015, Di-rektur Studi Pertanian Uni-versitas Padjadjaran Ronnie S Natawidjaja menekankan agar pemerintah menjadikannya momentum perbaikan logistik pangan.

Dikatakannya, menjawab persoalan produksi berikut gonjang-ganjing harga bukan-lah masalah iklim yang baik atau buruk. Masalah utama-nya yakni ketidaksiapan pe-merintah dan unit-unit teknis yang bertanggung jawab men-jaga kestabilan pasokan dan harga.

■ c85/c 78 ed: fitriyan zamzami

Mantan Komisioner KPK Turun Gunung dari hlm 1

pimpinan KPK merupakan indikasi adanya ketidakberes-an di dalam KPK. Jasin yakin, aspirasi yang disampaikan pegawai datang dari apa yang dirasakan di dalam.

Menurutnya, saat dia menjadi komisioner KPK, kelemahan hanya datang dari pihak luar. Pegawai dan pim-pinan solid karena satu visi dalam memberantas korupsi. “Zaman kami, KPK periode II, pimpinan dan seluruh jajaran pegawai solid,” ujarnya.

Selain Jasin, yang juga mendatangi gedung KPK Busyro Muqoddas (ketua KPK periode 2010-2011), Tumpak Hatorangan Panggabean (plt ketua KPK periode 2009-2010), Erry Riyana Hardjapa-mekas (wakil ketua KPK 2003-2007), dan Said Zainal Abidin (penasihat KPK pe-riode 2009-2013). Mantan ko-misioner KPK periode 2007-2011 Hayono Umar dan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua turut hadir.

Isu kelemahan KPK mencuat selepas lembaga tersebut menetapkan Kalemdikpol Pol-ri Komjen Budi Gunawan se-bagai tersangka kasus grati-fikasi pada Januari lalu. Pe-netapan tersangka itu me-nyusul pencalonannya sebagai calon kapolri tunggal oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah penetapan ter-sangka atas Budi Gunawan, dua pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Wdjo-janto dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri. Para penyid-ik dan komisioner lainnya juga terancam jadi tersangka.

Atas situasi tersebut, Jo-

sekaligus menonaktifkan Sa-mad dan Bambang Wdjo-janto. Ia kemudian mengang-kat Ruki yang juga mantan komisioner KPK sekaligus mantan jenderal polisi, peng-acara Indrianto Seno Adji, dan Deputy Pencegahan KPK Jo-han Budi sebagai plt pe-mimpin KPK.

Selepas pelantikan para plt, KPK memutuskan melim-pahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung pada Senin (2/3). Alasannya adalah putusan hakim PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan ter-sangka oleh KPK tak sah.

Para pegawai KPK lalu menyatakan penolakan secara terbuka atas sikap para pe-mimpin itu pada Selasa (3/3). Mereka tak sudi kasus Budi Gunawan dijadikan barter su-paya para komisioner dan pe-nyidik KPK dihentikan kasus-nya oleh kepolisian.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan segera menerbitkan ins-truksi presiden (inpres) ten-tang pemberantasan korupsi. Sekretaris Kabinet Andi Wi-djajanto mengatakan, inpres itu berisi strategi nasional pemberantasan korupsi 2015.

Andi menjelaskan, inpres disusun oleh Badan Peren-canaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat ini, drafnya sedang difinalisasi di Sekretaris Kabinet.

“Diharapkan minggu ini atau paling lambat minggu depan inpres 2015 tentang pemberantasan korupsi itu sudah bisa dikeluarkan,” uja-nya di Istana Kepresidenan

Menurut Andi, inpres ter-sebut menekankan pada mem-bangun sistem pemberantasan korupsi melalui upaya pence-gahan. Tak hanya itu, lanjut Andi, inpres juga berisi ten-tang sinergi antara lembaga penegak hukum yang ikut melakukan pemberantasan korupsi.

Kuda troya

LSM-LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Si-pil Antikorupsi terus melaku-kan aksi protes atas putusan pimpinan KPK yang melim-pahkan kasus Komjen Budi Gunawan, kemarin. Mereka menganggap, putusan tersebut tak lepas dari masuknya pe-laksana tugas pimpinan yang dinilai ikut melemahkan KPK.

Dalam aksinya, mereka membawa kuda Troya sebagai simbol lembaga antikorupsi itu telah disusupi dan dile-mahkan oleh beberapa pihak di internal KPK. Kuda Troya itu dipenuhi gambar berwujud Plt Ketua KPK Taufiequrach-man Ruki, Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, dan Presiden Joko Widodo.

Menurut aktivis LBH Ja-karta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil An-tikorupsi, Alghiffari Aqsa, tiga orang tersebut harus bertang-gung jawab atas lemahnya KPK. “Kami menilai bahwa sejak adanya Plt pimpinan KPK telah merusak keberani-an dan semangat dalam pem-berantasan korupsi,” katanya di gedung KPK, Rabu (4/3).

Aqsa mengatakan, pelim-pahan kasus BG ke Kejaksaan menunjukkan pimpinan KPK berpikir pragmatis, tidak in-dependen, tidak berani dalam menuntaskan kasus korupsi yang me-

Resonansi

Oleh Azyumardi Azra



Dua Pesantren, Dua Budaya (2)

Dua pesantren, dua budaya. Masa 20 tahun terakhir, setidaknya sejak 1990-an sampai sekarang, pesantren mengalami transfor-masi secara fisik, kelembagaan, maupun substansi pendidikan. Perubahan-perubahan itu agaknya mungkin tidak pernah dibayangkan kalangan pesantren sendiri dan pemerhati lembaga pen-didikan ini —yang sejak masa awal pembangunan Orde Baru pada awal 1970-an telah berbicara tentang ‘krisis pesantren’.

Apa yang disebut sebagai ‘krisis’ terutama ter-kait identitas tradisional pesantren, seperti otoritas kiai yang mutlak, santri yang mandiri, bersahaja, dan bekerja keras untuk menuntut ilmu. Moder-nisasi yang dilancarkan pemerintahan Orde Baru juga masuk ke pesantren menyangkut pembaruan kurikulum dan fasilitas seperti ‘listrik masuk pe-santren’ yang membuat tersingkirnya sumur dan ember untuk digantikan mesin pompa air sehingga para santri tidak perlu lagi menimba air —yang diasumsikan mengurangi kemandirian mereka.

Kedua pesantren, an-Nuqayah dan MTI Candung —seperti juga kebanyakan pesantren lain, khususnya di Pulau Jawa dan Madura— mengala-mi banyak perubahan fisik maupun substansi. Perubahan dalam berbagai aspek pesantren itu tidak bisa lain juga menimbulkan perubahan citra pesantren dalam masyarakat Indonesia.

Dari sudut populasi, Pesantren al-Nuqayah yang terdiri atas berbagai lembaga pendidikan memiliki lebih dari 8.000 santri dengan pesantren ca-bang daerah sekitar 14. Sedangkan Pesantren MTI Candung memiliki seper-sepuluhnya, sekitar 800 santri. Cabang pesantren MTI juga memiliki sejumlah cabang yang tersebar di berbagai tempat di Sumatra Barat.

Dalam hal perubahan citra, para santri pada ke-dua pesantren itu sudah la-ma tidak lagi merupakan ‘santri budug’ (kudisan) ka-rena asrama dan kamar tidur yang tidak bersih se-hingga tempat tidur mereka dipenuhi *budug* alias kepinding. Kini mereka hidup di lingkungan lebih higienis, bersih, dan sehat. Perubahan ini dimungkinkan karena perubahan lingkungan fisik pesantren secara keseluruhan.

Perubahan fisik itu sangat jelas terlihat. Pe-santren an-Nuqayah, misalnya, kini berdiri di atas lahan seluas 14 hektare. Di atas lahan itu ada dua masjid jami’; satunya warisan lama dan satunya lagi masih baru dan megah. Lalu masih ada sem-bilan mushalla, 525 asrama santri, 19 fasilitas perkantoran, 100 ruang kelas, satu kantor pos, dua gedung sekolah tinggi, 102 kamar mandi dan kakus, satu perpustakaan pesantren, dan 14 per-pustakaan daerah dan sekolah. Sebagian besar gedung di lingkungan pesantren ini permanen berlantai tiga.

Data fisik an-Nuqayah jelas mengagumkan. Tak banyak lembaga pendidikan umum maupun Islam yang memiliki fasilitas selengkap itu. Bahkan, bisa dengan mudah ditemukan masih

cukup banyak lembaga pendidikan di negeri ini yang memiliki fasilitas pas-pasan.

Pesantren MTI Candung agaknya termasuk ke dalam kelompok yang disebut terakhir. Pe-santren ini berada di lokasi tanah tidak begitu luas. Menjawab pertanyaan penulis Resonansi, seorang Tuanku Mukdo (‘kiai muda’) menyatakan lahan MTI Candung sekitar 1,2 hektare yang sudah penuh sesak dengan bangunan —yang beberapa di antaranya bertingkat dua.

Ia menuturkan, MTI Candung sedang men-gusahakan pembelian lahan seluas 8.000 meter, tidak jauh dari lokasi pesantren sekarang. Namun, harga sudah relatif mahal, hampir tidak ter-jangkau kemampuan keuangan pesantren. Itulah kendala utama Pesantren MTI sehingga tidak bisa ekspansi, misalnya, saja asrama santri putra yang sudah lama direncanakan hingga kini belum bisa dibangun karena ketiadaan lahan.

Dua pesantren, dua budaya. Di sinilah terletak kontras kedua pesantren dalam konteks budaya masyarakatnya. Masyarakat Madura sering disebut sebagai ‘miskin’ karena tanahnya yang berkapur dan tandus. Berbeda dengan lingkungan Candung yang subur.

Tetapi, kedua masyarakat ini, baik Madura maupun Minang, sama-sama punya tradisi mer-antau. Kelompok pertama karena susah penghidupan di negeri sendiri, sedangkan kelom-pok kedua lebih karena tradisi sosial budaya yang mengidealisasikan dan mero-mantisasi merantau.

Meski banyak orang Ma-dura pergi merantau, mereka adalah Muslim sangat berse-mangat. Sepanjang jalan sejak dari ujung jembatan Surama-du menuju Sumenep orang bisa menyaksikan deretan masjid demi masjid megah di sepanjang jalan. Hal ini kon-tras dengan Sumatra Barat. Jika orang berkendara dari Bandara Internasional Minang (BIM) di Kataping Padang Pariaman menuju Bukittingi, jelas tidak terlihat deretan masjid yang sambung-me-nyambung seperti yang bisa

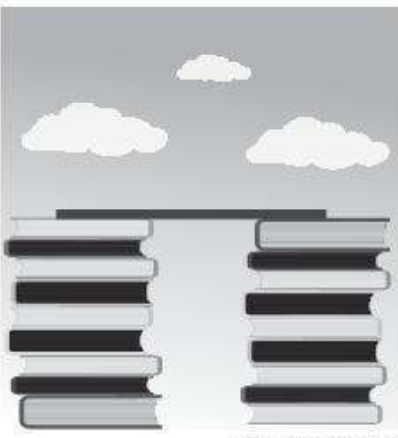
ditemukan sepanjang perjalanan menuju Sumenep.

Karena semangat itu pula, kelihatan Pesan-tren an-Nuqayah tidak menemui kesulitan berarti dalam hal lahan.

Bahkan, pesantren ini memiliki lahan wakaf yang dikelola menjadi perkebunan tanaman palawija seluas sedikitnya 26 hektare. Pesantren an-Nuqayah juga memiliki lahan wakaf lain seluas 19 hektare lebih.

Sementara itu, ketersediaan lahan merupakan masalah sangat pelik di Sumatra Barat. Terkait kerumitan soal hak ‘ulayat’ atau ‘pusaka tinggi’, amat sulit memperoleh lahan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan keagamaan dan pen-didikan.

Seperti terlihat dalam kasus Pesantren MTI dan lembaga pendidikan lain, sulit sekali me-nemukan adanya pemberian wakaf lahan dalam jumlah hektaran di Sumatra Barat. ■



Rendra Purnama/Republika

Perubahan di Kamp Pengungsi dari hlm 1

kecamatan. Setiap kecamatan setidaknya memiliki lima hingga 10 Health Centre. “Tentunya bergantung pada luas area dan besaran populasi dalam kamp,” kata Thurein.

Di tingkat paling atas terda-pat fasilitas di setingkat kabu-paten/kota. Di tingkat ini ada Station Hospital yang membe-rikan perawatan lebih menda-lam. “Sarana dan prasarana di fasilitas ini sudah mencukupi, bisa untuk *city scan* juga tin-dakan operasi,” kata dia.

Dalam menjalankan sistem-nya, Thurein didukung 224 tena-ga medis yang terdiri atas 43 dokter, 95 perawat serta tenaga medis lainnya. Pihaknya juga dibantu relawan serta program *mobile clinic*.

Dari apa yang terlihat, kon-disi di Sittwe, Rakhine, saat ini jauh berubah. Kondisinya lebih kondusif. Kabar yang menye-butkan keraperterjadi pergesekan dua kelompok seperti yang ter-jadi pada 2012 tidak tampak lagi.

Ruang gerak terbatas

Kendati telah banyak per-ubahan, ruang gerak pengungsi, khususnya Muslim Rohingya, masih terbatas. Muslim Rohing-ya belum sepenuhnya merdeka. Mereka belum mendapatkan status warga negara yang mem-buat mereka terpaksa masih tinggal di dalam kamp.

Berdasarkan pengamatan *Republika*, kondisi pengungsian tidak jauh berbeda dengan 2012. Pengungsi masih tinggal di ban-gunan semipermanen beralas dan beratap anyaman bambu. Tidak ada air bersih yang men-galir selama 24 jam.

Pengungsi mengantungkan kebutuhan air bersih pada tam-pungan air hujan serta sumur yang di musim panas bisa saja mengering. Begitu juga dengan aliran listrik, mereka hanya memanfaatkan *solar cell* yang unitnya terbatas hasil pemberian sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Untuk bahan makanan, mereka sedikit banyak berharap

dahal, selama ini mereka dikenal sebagai pekerja keras, baik sebagai nelayan ataupun petani. Kondisi ini tak lepas dari penjagaan ketat yang dilakukan pemerintahan setempat. Para pengungsi tidak bisa dengan mudah keluar dari pengungsian untuk menuju kota. Mereka hanya dibolehkan meninggalkan pengungsian jika mendapat izin dari pihak keamanan, yang ten-tunya bukan hal mudah. Hanya urusan mendesak seperti alasan kesehatan yang membuat mere-ka diizinkan keluar.

Padahal, hanya berjarak se-kitar dua kilometer dari lokasi pengungsian, kondisi berbeda terlihat jelas. Kota Sittwe berak-tivitas dengan riuh dari pagi hingga malam. Listrik tersam-bung selama 24 jam. Berbagai kebutuhan terpenuhi dengan baik.

Habibullah, seorang peng-ungsi lainnya, menyebut masih banyak kamp lain yang kondisi-nya jauh lebih buruk. *Republika* bertemu Habibullah di kamp Say Tha Mar Gyi. Sejak tiba di kamp, ia memang terlihat mencoba menarik perhatian.

Dengan seksama ia melihat pergerakan lima personel polisi yang selalu mengawal tim. Ke-tika melihat seluruh personel polisi masuk ke dalam klinik, saat itulah ia menarik *Republika* yang sedang berada di pintu masuk klinik ke arah samping bangunan. Ternyata Habibullah tidak sendiri, ada dua rekannya yang mencoba mengawasi ke-adaan.

Berbeda dengan pengungsi kebanyakan, kemampuan baha-sa Inggris Habibullah lebih baik. Dengan singkat dan jelas ia me-ngatakan masih banyak saudara lainnya yang hidup dalam ke-adaan lebih buruk. Tidak ada su-plai bantuan yang terdistribusi berkala.

Bahkan, untuk membuktikan ucapanya, Habibullah mengajak *Republika* pergi ke kamp yang ia maksud. “Apakah kamu punya waktu?” katanya. “Setidaknya butuh perjalanan sekitar satu

Habibullah memberi kode untuk segera mengakhiri pembicara-an. Rupanya aktivitas kami tadi diawasi polisi lain yang berada di dalam mobil. Polisi itu lantas menghampiri dan menelisik le-bih jauh apa yang kami kerjakan. Beruntung, saat itu rom-bongan keluar dari klinik untuk kembali menuju mobil. Dengan terpaksa polisi yang bertugas sebagai pengemudi di mobil pengawal kembali ke kendara-annya.

Habibullah berjanji akan menghubungi dan memberikan gambaran sebenarnya. Namun, hingga *Republika* meninggalkan Myanmar, Habibullah belum ju-ga menyampaikan apa yang di-maksud.

Memang bukan Muslim Ro-hingya saja yang masih meng-huni kamp. Sejumlah masya-rakat Rakhine juga menjadi korban kerusuhan ada pula yang tinggal di dalam kamp. Namun, kondisinya jauh lebih baik.

Jika sebelumnya terdapat lima kamp pengungsi Rakhine, kini hanya tersisa dua kamp. Tiga penghuni kamp sebelumnya sudah direlokasi. Dalam waktu dekat, dua kamp yang tersisa juga akan segera direlokasi.

Letak dua kamp Rakhine se-benarnya tidak jauh dari jalan utama Sittwe. Dari jalan utama Sittwe tinggal mengarah ke timur laut. Atau, tepatnya di kanan ja-lanan utama, dekat terminal bus Sittwe. Dari terminal itu tinggal masuk ke dalam dan menyusuri jalan sejauh 400 meter.

Berbeda dengan kamp Muslim Rohingya, kamp Rakhine umumnya rumah panggung. Di daerah itu kerap terserang banjir dari luapan sungai yang berada di sisi kiri kamp. Daerah kamp Rakhine relatif lebih sejuk. Ba-nyak pepohonan yang tumbuh di dalam dan sekitar kamp.

Begitu juga dengan aktivitas penghuninya. Jika Muslim Ro-hingya masih terkekang di dalam kamp, penghuni di kamp Rakhi-ne banyak yang berkegiatan di luar. Mereka umumnya bekerja di luar kamp.

Dapat disimpulkan bahwa keadaan Muslim Rohingya saat ini belum sepenuhnya merdeka.